

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembinaan Keluarga Sejahtera adalah istilah yang diberikan kepada program sebelum disebut Pemberdayaan Keluarga Sejahtera. Bimbingan Keluarga Sejahtera adalah gerakan pengembangan masyarakat yang dimulai di Bogor pada tahun 1957 dengan seminar Ekonomi Rumah Tangga yang menghasilkan rumusan sepuluh (sepuluh) prinsip kehidupan keluarga, diikuti dengan pengembangan kurikulum pendidikan Keluarga Kesejahteraan yang diajarkan di sekolah dan pengaturan komunitas. Kementerian pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan mengikuti pada tahun 1961, menetapkan 10 bidang kehidupan keluarga sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga yang diajarkan di sekolah dan pendidikan masyarakat (PENMAS) sampai sekarang. Kehidupan orang-orang di Jawa Tengah suram dan tidak pasti tentang tahun 1967.

Kebijakan Presiden Republik Indonesia menyarankan kepada Menteri Dalam Negeri agar PKK dilaksanakan di provinsi-provinsi Indonesia dengan dalih “Pembangunan Kesejahteraan Keluarga” (PKK). Menurut surat Mendagri No. SUS.3/6/12 tanggal 27 Desember 1972. Selanjutnya gerakan PKK diatur dan dibantu oleh Departemen Dalam Negeri, yang dikaitkan dengan Pembinaan Kelembagaan Sosial Desa, yang kemudian menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980. Menyusul ditetapkannya peran perempuan dalam pembangunan dalam

GBHN/TAP MPR Nomor 4 Tahun 1978, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Nomor 10 tahun 1980 untuk membentuk Tim Penggerak PKK di setiap tingkat pemerintahan. Menyusul terbentuknya tim penggerak PKK di semua tingkat pemerintahan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, pada tahun 1982 dibentuk tim penggerak PKK Pusat. Para kader PKK dari 27 provinsi mengikuti Jambore Nasional Kader Posyandu yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Pusat pada bulan Desember 1997.

Menurut Era Reformasi dan GBHN 1999, terdapat paradigma baru pembangunan dan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, Tim Penggerak PKK Pusat menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa PKK pada tanggal 31 Oktober sd 2 November 2000 di Bandung, yang menghasilkan poin-poin kesepakatan sebagai berikut: Pembinaan Keluarga Sejahtera untuk Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, disingkat PKK.

Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan pembangunan masyarakat nasional. Hal ini terkait dengan berbagai inisiatif pembangunan yang sedang atau akan dilaksanakan, di mana kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam keberhasilan program. Ini bukan hanya masalah pemerintah; siapa pun yang percaya bahwa mereka mampu, laki-laki atau perempuan, harus terlibat dalam proses pembangunan.

Di masa lalu, perempuan dianggap lebih bertanggung jawab atas keluarga dan semua aktivitas di rumah, sementara laki-laki dianggap lebih bertanggung jawab atas aktivitas publik (dunia kerja) seperti ekonomi, politik, dan institusi

lain yang menopang masyarakat kontemporer. . Dhevyanti, 2015: 3). Sugiarti, dalam Dhevyanti, 2015: 3).

Pemberdayaan perempuan, menurut Aritonang (2000: 142-143), adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol, antara lain, pengambilan keputusan, sumber daya, dan struktur atau jalur pendukung. Akibatnya, perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama untuk terlibat aktif dalam semua upaya pembangunan seperti laki-laki. Pada dasarnya, pertumbuhan dapat berjalan lancar jika sumber daya manusia dimanfaatkan secara maksimal.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 26 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan peningkatan peran Perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera di daerah. Partisipasi perempuan dalam pembangunan bangsa terutama ditujukan untuk meningkatkan status (status), peran, bakat, kemandirian, serta ketahanan mental dan spiritual. Perempuan merupakan elemen integral dari inisiatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Partisipasi perempuan dalam pembangunan, penciptaan keluarga kaya, dan pengasuhan generasi muda secara eksplisit dituntut oleh peran perempuan dalam pembangunan.

Sesuai dengan hal tersebut, peran perempuan antara lain membantu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas dan kemandirian, dan memajukan sumber daya manusia, masyarakat, dan negara Indonesia, serta mendorong dan meningkatkan peserta aktif dan swadaya di seluruh masyarakat. Penting untuk meningkatkan tindakan perempuan dalam meningkatkan

kesejahteraan keluarga untuk mendorong keterlibatan mereka dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi saat ini tidak mampu mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan. Pengembangan organisasi masyarakat, seperti Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, merupakan salah satu inisiatif dalam pemberdayaan masyarakat (PKK).

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang menggalang partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dan kegiatan organisasi. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan yang dimulai dari perempuan sebagai perintis, membangun dan menciptakan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, maka upaya membangun masyarakat yang sejahtera harus dimulai dengan upaya mensejahterakan setiap keluarga.

Istilah “pemberdayaan perempuan” dipilih karena mengandung makna upaya sistematis dan matang untuk memajukan kesetaraan dan keadilan gender di rumah, masyarakat, bangsa, dan negara. mengontrol sumber daya material dan non-material utama

Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan mengacu pada semua tindakan yang dilakukan oleh PKK dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi perempuan, sehingga mereka memiliki keterampilan dan keahlian untuk menangani masalah yang

mereka hadapi sendiri melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan kualitas hidup.

Dari hasil pengamatan awal yang saya lakukan terlihat bahwa organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso, masih memiliki beberapa masalah seperti sumber daya manusia anggota organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) masih sangat rendah sehingga kurang memahami tugas dan fungsi mereka, kurang aktifnya anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa dan dana yang di alokasikan dari desa untuk menopang kegiatan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sangat kurang dan tidak lancar sehingga kegiatan tidak berjalan dengan maksimal.

Dari uraian masalah ini, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso”**

B. Rumusan Masalah Penelitian.

Adapun permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini, adalah;

1. Bagaimana peran pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam pemberdayaan Perempuan di desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso ?

2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi peran pemberdayaan kesejateraan keluarga (PKK) dalam pemberdayaan Perempuan di desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemberdayaan kesejateraan keluarga (PKK) dalam pemberdayaan Perempuan di Desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa yang mempengaruhi peran pemberdayaan kesejateraan keluarga (PKK) dalam pemberdayaan Perempuan di Desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat membantu Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Amporiwo.
2. Secara akademis, temuan penelitian ini akan menambah body of knowledge dalam mata kuliah administrasi publik dan memberikan wawasan kepada civitas akademika.

